



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR RI
KE PROVINSI ACEH
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019-2020
TANGGAL 18 s.d. 22 DESEMBER 2019**

*

**

**

*

JAKARTA 2019



**LAPORAN
KUNJUNGAN KERJA RESES KOMISI IV DPR RI
DI PROVINSI ACEH
MASA PERSIDANGAN I TAHUN SIDANG 2019-2020
18 s.d. 22 DESEMBER 2019**

1. PENDAHULUAN

A. DASAR KUNJUNGAN KERJA

Dasar hukum yang dipergunakan dalam melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI di Provinsi Aceh adalah:

1. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib:
 - a. Pasal 58 ayat 3.d.: Tugas komisi dalam bidang pengawasan adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan pemerintah.
 - b. Pasal 58 ayat 4: Komisi dalam melaksanakan tugas sebagaimana ayat (3) dapat mengadakan kunjungan kerja.
2. Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 18 Oktober 2019 dan 11 Desember 2019.
3. Keputusan Rapat Intern Komisi IV DPR RI tanggal 31 Oktober 2019.

B. RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Aceh adalah melakukan pengawasan terhadap kebijakan Pemerintah di sektor pertanian dan pangan, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan. Terdapat 5 (lima) lokasi yang dikunjungi, yaitu:

1. Peninjauan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri Aceh Besar, terkait dengan kesiapan dalam melestarikan ternak lokal khas Aceh.
2. Peninjauan Pelabuhan Perikanan & Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Banda Aceh.
3. Pertemuan dan Ramah Tamah dengan Gubernur Aceh, Kepala Dinas, Ketua Kadin Aceh, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia *Holding Company*, PT Perkebunan Nusantara I, dan Perum Perikanan Indonesia.
4. Peninjauan Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Weh, Sabang.
5. Peninjauan ke Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang.

C. SUSUNAN TIM

Pada Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020, Komisi IV DPR RI membagi 3 (tiga) daerah yang ditinjau, yaitu Provinsi Aceh, Provinsi Jawa Timur, dan Provinsi Sulawesi Selatan. Anggota Tim Kunjungan yang melakukan peninjauan ke Provinsi Aceh adalah:

No	Nama	Fraksi
1	H. DEDI MULYADI, S.H.	KETUA TIM/F.PG
2	DANIEL JOHAN, S.E.	WK. KETUA/F.PKB
3	Ir. EFFENDI SIANIPAR	ANGGOTA/F.PDIP
4	Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.	ANGGOTA/F.PDIP
5	KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP.	ANGGOTA/F.PDIP
6	Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.	ANGGOTA/F.PG
7	H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.	ANGGOTA/F.PG
8	BUDHY SETIAWAN	ANGGOTA/F.PG
9	Ir. H. ENDRO HERMONO, M.B.A.	ANGGOTA/F.GERINDRA
10	Ir. H. T. A. KHALID, M.M.	ANGGOTA/F.GERINDRA
11	SULAEMAN L. HAMZAH	ANGGOTA/F.NASDEM
12	FARIDA HIDAYATI, S.H., M.Kn.	ANGGOTA/F.PKB
13	MUSLIM, S.HI., M.M.	ANGGOTA/F.PD
14	Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.	ANGGOTA/F.PD
15	H. JOHAN ROSIHAN, S.T.	ANGGOTA/F.PKS
16	FACHRY PAHLEVI KANGGOASA, S.E.	ANGGOTA/F.PAN

D. PELAKSANAAN KUNJUNGAN

Kunjungan Kerja dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 22 Desember 2019.

E. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dilakukannya Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Provinsi Aceh untuk:

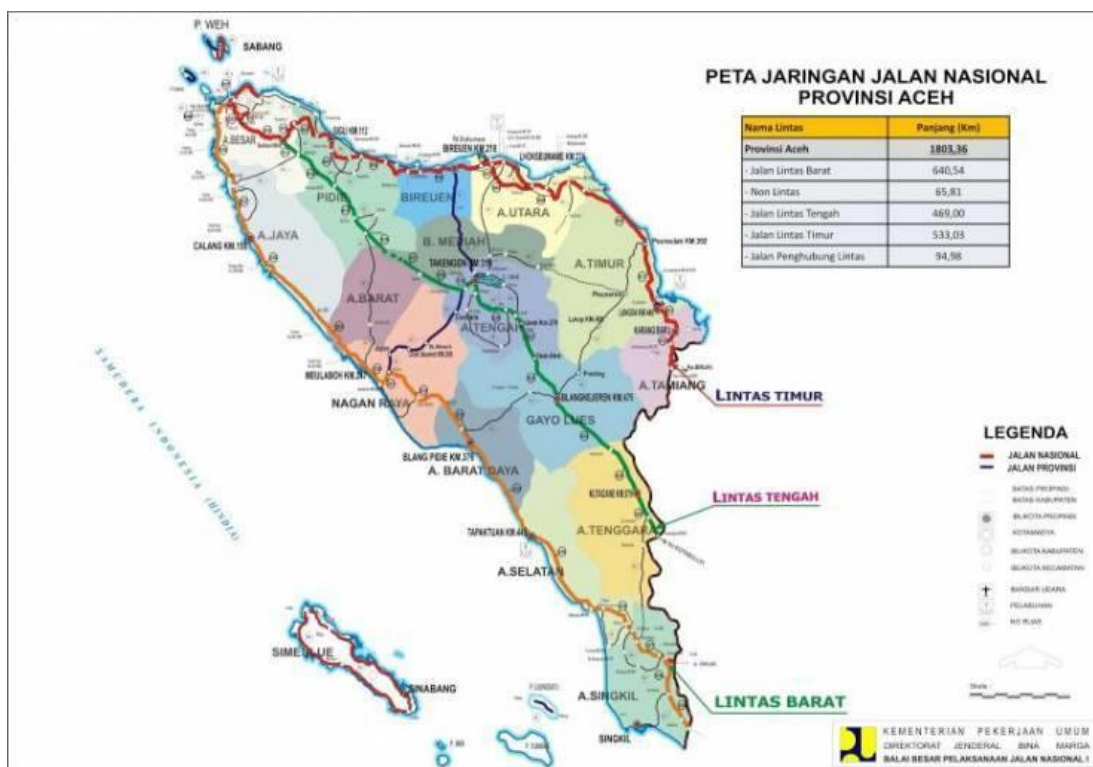
1. Meninjau secara langsung perkembangan program Pemerintah di sektor pertanian dan pangan, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan.
2. Menyerap aspirasi masyarakat, Pemerintah Daerah, dan mitra Komisi IV DPR RI terkait dengan permasalahan, dukungan program, dan pengembangan sektor pertanian dan pangan, kelautan dan perikanan, serta lingkungan hidup dan kehutanan di Provinsi Aceh.

F. GAMBARAN UMUM PROVINSI DI ACEH

Ibu kota Provinsi Aceh adalah Banda Aceh. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang diberi status sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus. Aceh terletak di ujung utara pulau Sumatra dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Jumlah penduduk Aceh sekitar 5.281.891 jiwa. Aceh berbatasan dengan Teluk Benggala di sebelah utara,

Samudra Hindia di sebelah barat, Selat Malaka di sebelah timur, dan Sumatra Utara di sebelah tenggara dan selatan.

Sebagai negara kepulauan yang memiliki ribuan pulau, konektivitas antarpulau sangat diperlukan untuk mendorong pemerataan pembangunan ekonomi di berbagai wilayah, khususnya *remote* area seperti Sabang di Provinsi Aceh. Kesulitan akses dan kesulitan pembangunan infrastruktur menjadi kendala yang klasik dan terus terjadi. Untuk itu, Pemerintah perlu melakukan terobosan kebijakan lintas sektor yang terintegrasi diberbagai bidang dalam membangun suatu daerah untuk mengejar ketertinggalan. Salah satunya dengan melibatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar dapat berjalan lebih efektif. Kemudian terkait pangan sektor pertanian, perikanan, kelautan, kehutanan, dan lingkungan hidup memiliki peran besar dalam menghidupkan bangsa dan negara Indonesia. Keenam sektor ini masih menjadi primadona dan penyumbang terbesar kedua dalam pertumbuhan PDB Nasional.



G. BALAI PEMBIBITAN TERNAK UNGGUL DAN HIJAUAN PAKAN TERNAK (BPTU-HPT) INDRAPURI ACEH

BPTU-HPT Indrapuri merupakan unit pelaksana teknis di bidang peternakan dan kesehatan hewan, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan secara teknis dibina oleh Direktur Perbibitan Ternak dan Direktur Pakan, yang memiliki tugas melaksanakan pemeliharaan, produksi, pemuliaan, pengembangan, penyebaran dan distribusi bibit ternak unggul, khususnya sapi Aceh, serta produksi dan distribusi benih/bibit hijauan pakan ternak. Sapi Aceh merupakan rumpun sapi lokal Indonesia yang mempunyai sebaran asli geografis di Provinsi Aceh dan telah dibudidayakan secara turun temurun sebagai kekayaan sumber daya genetik ternak Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan Menteri

Pertanian Nomor 2907/Kpts/OT.140/6/2011 tentang Penetapan Rumpun Sapi Aceh.

Sapi Aceh memiliki keunggulan mampu beradaptasi dengan sangat baik dengan lingkungan tropis, plasma nutfah lokal, kapabilitas terhadap pakan kualitas jelek, relatif tahan terhadap parasit internal dan eksternal, produktivitas baik, karkas 49-51%, struktur daging memiliki jaringan lebih halus, padat, dan lebih baik dari sapi Brahman & PO.

BPTU-HPT Indrapuri berada di Desa Reukih Dayah Kecamatan Indrapuri, Kabupaten Aceh Besar Provinsi Aceh. Posisinya terletak di daerah yang memiliki topografi berbukit-bukit dan berada pada ketinggian (lebih kurang 30-80 mdpl). Daerahnya termasuk beriklim panas dengan suhu rata-rata mencapai 98 hari per tahun.

Lebih dari 30% lahan yang ada merupakan daerah perbukitan dan semak belukar, sisanya merupakan kebun rumput dimana berbagai jenis hijauan pakan ternak yang ada di Indrapuri yakni Rumput *Brachiaria Decumbens* (BD), Rumput *Braehiaria Hummidicsla* (BH), Rumput Benggala, Rumput Gajah Odot, Rumput Lampung, *Ledigotora Sp (Tarum)*, Lantoro Mini, dan *Indigofera*.

Tercatat sampai tanggal 30 November 2019, populasi sapi Aceh di balai tersebut mencapai 991 ekor yang terdiri dari dewasa jantan sebanyak 203 ekor, dewasa betina sebanyak 476 ekor, muda jantan sebanyak 99 ekor, muda betina sebanyak 88 ekor, anak jantan sebanyak 58 ekor, dan anak betina sebanyak 67 ekor. Adapun angka kebuntingan per November 2019 sebanyak 200 ekor, produksi bibit sebanyak 82 ekor, dan kelahiran ternak sebanyak 121 ekor.

BPTU-HPT melakukan kegiatan distribusi dengan melalui berbagai cara:

1. Seluruh bibit unggul yang dihasilkan, dipasarkan melalui lelang terbuka yang dapat diikuti oleh instansi pemerintah, perusahaan swasta, koperasi, kelompok ternak serta perorangan yang berusaha dan bergerak di pembibitan sapi potong.
2. BPTU-HPT Indrapuri juga mendukung program pemerintah dalam penyediaan bibit untuk program khusus melalui mekanisme distribusi dan hibah.

Village Breeding Center Sapi Aceh di Provinsi Aceh diantaranya pembinaan kelompok ternak Aceh Besar, pembinaan kelompok Aceh Jaya, pembinaan kelompok ternak Aceh Utara, pembinaan kelompok ternak Aceh Tengah, pembinaan kelompok ternak Bireun, dan pembinaan kelompok Aceh Tamiang.

H. PELABUHAN PERIKANAN & PANGKALAN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN (PSDKP) LAMPULO, BANDA ACEH

Pada kunjungan kali ini Komisi IV DPR RI mendapatkan beberapa hal informasi, antara lain:

Pelabuhan Perikanan Lampulo, Banda Aceh

Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo merupakan salah satu Pelabuhan Perikanan Tipe A yang terbesar di Aceh, sebagai pelabuhan perikanan yang akan terus dikembangkan diharapkan mampu menjalankan semua fungsi pemerintahan dan sistem bisnis perikanan yang bertujuan untuk meningkatkan

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat perikanan, adapun fungsi Pemerintahan dan perusahaan yang sudah berjalan di Pelabuhan Perikanan Lampulo adalah:

1. Pelayanan tambat dan labuh kapal perikanan;
2. Pelayanan bongkar muat;
3. Pemasaran dan distribusi ikan;
4. Pengumpulan data hasil tangkapan dan perikanan;
5. Pelaksanaan kesyahbandaran;
6. Pelaksanaan kegiatan operasional kapal perikanan;
7. Tempat penelitian dan publikasi riset kelautan dan perikanan;
8. Tempat pelaksanaan pengawasan dan pengendalian sumber daya ikan;
9. Pemanfaatan fasilitas dan lahan di pelabuhan perikanan;
10. Pelayanan pembinaan mutu dan pengolahan hasil perikanan;
11. Pelayanan logistik dan perbekalan kapal perikanan;
12. Wisata Bahari.

Sejak tanggal 7 Januari 2014 Pelabuhan Perikanan (PP) Lampulo telah dijalankan operasionalnya di lokasi baru dengan luas lahan darat 62 Ha. Pindahan ini terutama mengingat lokasi PP Lampulo yang lama tidak memungkinkan untuk pengembangan lebih lanjut. Pada 13 Desember 2015 bertepatan dengan Hari Nusantara, Wakil Presiden H. M. Jusuf Kalla meresmikan PP Lampulo menjadi PPS Lampulo, dan pada tanggal 21 Juli 2016 ditetapkan melalui keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 31/KEPMEN-KP/2016 tentang peningkatan status Pelabuhan Perikanan Lampulo menjadi Pelabuhan Perikanan Samudera Lampulo.

- VISI: Pelabuhan perikanan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sentra kegiatan bisnis perikanan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
- MISI: Mengembangkan sarana dan prasarana perikanan yang memadai untuk meningkatkan produktivitas, nilai tambah produk perikanan yang ramah lingkungan dalam upaya menciptakan lapangan kerja.



MASTER PLAN



Tabel 1. Perkembangan Produksi Ikan (Kg) dan Jumlah Armada Kapal PPS Lampulo

No	Bulan	2013	2014	2015	2016	2017
1	Januari	465,965	481,76	81,369	503,785	761272
2	Februari	406,705	527,866	598,958	604,18	495750
3	Maret	731,422	570,284	1,410,144	1,756,850	1380975
4	April	786,758	435,918	1,049,344	1,652,782	1276228
5	Mei	694,073	434,053	1,496,202	1,474,716	1580271
6	Juni	583,983	700,279	992,224	792,885	763016
7	Juli	1,052,974	442,327	564,402	531,078	990660
8	Agustus	741,967	625,53	1,137,156	842,446	1317727
9	September	1,057,007	810,574	850,038	761,306	
10	Oktober	762,005	1,247,086	962,67	1,618,005	
11	November	926,611	1,499,453	1,489,263	1,412,801	
12	Desember	850,652	744,731	822,677	655,972	
	Total	9,060,122	8,519,861	12,154,447	12,579,806	
	Rata-rata Perbulan	766,436	709,988	1,012,871	1,048,317	8,567,916

- Fasilitas pokok, antara lain: *breakwater* utama, *breakwater*, dermaga tambat/muat, dermaga tuna, dan sarana navigasi.
- Fasilitas fungsional, antara lain: TPI, tanki BBM, *reservoir*, tempat perbaikan jaring, kios dan toserba, gudang pengepakan, *workshop*, *docking*, rumah genset, kantor administrasi, pabrik es, *cold storage*, unit pengolahan limbah.
- Terdapat pabrik es dan *cold storage* yang dikelola PT Aceh Lampulo Jaya Bahari.



Tabel 2. Jumlah Armada dan Alat Tangkap di PPS Lampulo 2014-2017

Tahun	Armada Tangkap perkategori (Gross Tonne)		Jenis Alat Tangkap				Jumlah
			Gillnet	Pancing	Perse Seine	Sero	
2014	< 5	36 unit	1	35	-	-	36
	6 - 10	125 unit	1	63	60	1	125
	11 - 20	36 unit	-	1	35	-	36
	21 - 30	55 unit	2	-	53	-	55
	31 - 50	61 unit	-	-	61	-	61
	51 - 100	29 unit	-	-	29	-	29
	> 100	1 unit	-	-	1	-	1
Total	343	unit	4	99	239	1	343
2015	< 5	39 unit	2	37	-	-	39
	6 - 10	136 unit	-	70	65	1	136
	11 - 20	37 unit	-	1	36	-	37
	21 - 30	54 unit	-	-	54	-	54
	31 - 50	64 unit	-	1	63	-	64
	51 - 100	32 unit	-	-	32	-	32
	> 100	3 unit	-	-	3	-	3
Total	365	unit	2	109	250	1	365
2016	< 5	29 unit	-	27	2	-	29
	6 - 10	136 unit	1	67	68	-	136
	11 - 20	28 unit	-	-	28	-	28
	21 - 30	54 unit	-	1	53	-	54
	31 - 50	66 unit	-	-	66	-	66
	51 - 100	42 unit	-	-	42	-	42
	> 100	5 unit	-	-	5	-	5
Total	360	unit	1	95	264	-	360
2017	< 5	32 unit	-	30	2	-	32
	6 - 10	138 unit	1	67	70	-	138
	11 - 20	28 unit	-	-	28	-	28
	21 - 30	57 unit	-	1	56	-	57
	31 - 50	66 unit	-	-	66	-	66
	51 - 100	44 unit	-	-	44	-	44
	> 100	5 unit	-	-	5	-	5
Total	370	unit	1	98	271	-	370

Tabel 3. Komoditas Ikan yang Dominan

NO	JENIS IKAN	RATA-RATA/KG (Rp)	
		2016	2017
1	Tuna (Yellow Fin)	25,536	27.805
2	Selar	20,639	22.541
3	Cakalang	16,032	17.446
4	Sunglir	14,893	16.832
5	Tongkol Komo	14,775	18.043
6	Tongkol Krai	14,269	15.629
7	Kambing-kambing	13,291	12.997
8	Lisong	12,889	13.657
9	Layang	12,475	16.942
10	Siro/Lemuru	10,817	12.142

Tabel 4. Perputaran Uang di PPS Lampulo, sebagai berikut:

2013	2014	2015	2016
Rp113,9 M	Rp125,9 M	RP165,3 M	Rp182,1 M

- Tantangan yang sedang dihadapi PPS Lampulo, antara lain: kolam labuh masih dangkal, ketersediaan air bersih masih kurang, fasilitas *cold storage* masih kurang, hak pengelolaan lahan belum selesai, *skill* nelayan (*technical* maupun *managerial skill*) masih rendah sehingga dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas produk, serta lembaga perkreditan dan sistem kredit yang belum efektif dalam menunjang usaha perikanan rakyat.

Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Banda Aceh

Tugas PSDKP meliputi perikanan tangkap, usaha budi daya, pengolahan, pengangkutan dan pemasaran hasil perikanan.

- Wilayah Kerja Pangkalan PSDKP Lampulo: Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Kota Sabang dengan wilayah kerja operasionalnya mencakup WPPNRI 571 dan WPPNRI 572.
- Wilayah Kerja Satwas SDKP Aceh Barat: Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Nagan Raya (WPPNRI 572).
- Wilayah Kerja Satwas SDKP Simeulue: Kabupaten Simeulue, Kota Subulussalam, Kabupaten Aceh Singkil, Kabupaten Aceh Selatan (WPPNRI 572).
- Wilayah Kerja Satwas SDKP Sibolga: Kab. Humbang Hasundutan, Nias Selatan, Nias, Nias Utara, Nias Barat, Kota Gunung Sitoli, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Tapanuli Tengah, Kota Sibolga, Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Kota Padang Sidempuan, Tapanuli Utara, Pakpak Barat (WPPNRI 572).
- Wilayah Kerja Satwas Padang: Kab. Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Kota Padang, Padang Pariaman, Solok, Kota Solok, Kabupaten Solok Selatan, Dharmasraya, Kota Pariaman, Kota Sawahlunto, Kota Padangpanjang, Agam, Sinjunjung, Tanah Datar, Kota Payakumbuh, Pasaman Barat, Lima Puluh Kota, Pasaman, Kota Bukit Tinggi (WPPNRI 572).
- Wilayah Kerja Satwas Bengkulu: Bengkulu Utara, Kaur, Bengkulu, Kota Bengkulu Selatan, Seluma, Kepahiang, Rejanglebong, Lebong, Muko-Muko (WPPNRI 572).
- Terdapat 5 Satuan Pengawasan SDKP yaitu Satwas Aceh Barat, Simeulue, Padang, Sibolga, dan Bengkulu.
- Terdapat 5 Satuan Pengawasan SDKP yaitu Satwas Aceh Barat, Simeulue, Padang, Sibolga, dan Bengkulu.
- Pengawasan Penggunaan Alat Tangkap Dilarang yang tidak ramah lingkungan "*Mini Trawl*", yakni ditemukan di daerah:
 - Kab. Aceh Barat tepatnya di Kec. Johan Pahlawan terdapat ± 210.
 - Kab. Aceh Barat Daya tepatnya di Kec. Samatiga, Kec. Kuala Pasir terdapat ± 140.

Tabel 5. Sarana Pengawasan

NO	KAPAL	HASIL
1	KP Hiu 012	Diperiksa sebanyak 36 unit, laik 32 unit, tidak laik 4 unit
2	KP. Napoleon 045	12 kapal diperiksa dan laik semua
3	KP. Napoleon 036	Diperiksa 45 unit, laik 41 unit, tidak laik 4 unit
4	KP. Kakap	Diperiksa 42 unit, laik 38 unit, tidak laik 4 unit
5	KP. Dolphin ST.BL.01	Diperiksa 17 unit dan laik semua
6	Rigid Inflatable Boat/Sea Rider	Diperiksa 11 unit dan laik semua

Tabel 6. Penerbitan Hasil Pemeriksaan Kapal (HPK) dan Surat Laik Operasi (SLO) Kapal Perikanan Tahun 2019, yakni:

BULAN	IJIN PUSAT/ZEEI LAUT LEPAS				IJIN DAERAH/TERITORIAL & PEDALAMAN			
	RIKSA	TIDAK TAAT	TAA T	% KETAATAN	RIKSA	TIDAK TAA T	TAAT	% KETAATAN
JAN	2	0	2	100%	203	-	203	100%
FEB	3	0	3	100%	260	-	260	100%
MARET	3	0	3	100%	298	-	298	100%
APRIL	3	2	1	33%	308	-	308	100%
MEI	3	2	1	33%	320	3	317	99%
JUNI	3	3	0	0%	334	4	330	99%
JULI	17	7	10	22,2%	1.723	7	1.716	99,6%
AGUS	32	14	18	18,5%	3.243	14	3.229	99,6%
SEPT	61	28	33	13,58%	6.226	28	6.198	99,52%
JUMLAH	127	56	71	47%	12.915	56	12.859	100%

Keterangan:

- PERMEN KP Nomor: 1 Tahun 2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan
- Penerbitan HPK & SLO dilakukan di Satwas SDKP Aceh Barat, Satwas SDKP Simeulue, Satwas SDKP Sibolga, Satwas SDKP Padang, dan Satwas SDKP Bengkulu.
- Khusus Provinsi Aceh Kapal Perikanan Izin Pusat (> 60 GT), sedangkan provinsi lain (> 30 GT), dan Kapal Perikanan izin Daerah di Propinsi Aceh (< 60 GT).
- Pengawasan Unit Pengolahan Ikan. Terdapat 12 UPI yang telah diverifikasi, yaitu: 4 UPI Skala Besar (Tapanuli Tengah), 8 UPI Skala Kecil (Kab. Aceh Besar, Kota Banda Aceh, Sibolga, Padang, Bengkulu). Yang telah memenuhi persyaratan Teknis, yaitu: SKP sebanyak 11 UPI (1 UPI dalam Proses), dan

UPI Skala Besar telah memiliki HACCP. Sedangkan 3 UPI skala kecil dalam proses pelaporan di Dinas Kelautan dan Perikanan.



- Pengawasan Usaha Budi Daya Perikanan. Terdapat 24 UBI (Unit Budi Daya Ikan) yang telah di verifikasi terdiri dari: 24 UBI Skala Kecil (Kota Banda Aceh, Aceh Besar, Aceh Barat, Padang) dan yang telah memenuhi persyaratan Teknis, terkait SIUP/TDP sebanyak 7 UBI (17 UBI masih dalam proses pelaporan di Dinas Kelautan & Perikanan).
- Penerbitan LVHPI Semester I Tahun 2019. Lembar Verifikasi Hasil Pendaratan Ikan (LVHPI) diterbitkan sebagai salah satu syarat ekspor produk perikanan, yang menyatakan bahwa ikan ditangkap tidak dengan cara-cara IUU Fishing. Penerbitan LVHPI telah dilakukan sebanyak 6 buah dan digunakan sebagai salah satu persyaratan ekspor Uni Eropa, terdiri dari 3 kapal penangkap Ikan diatas 60 GT dengan alat tangkap Purse Seine, dengan komoditas Cakalang dan Tongkol, dengan wilayah tangkapan di perairan Samudera Hindia (WPPNRI 572).
- Pengawasan distribusi ikan secara terpadu di pasar-pasar dalam wilayah Kota Banda Aceh dan Aceh Besar dengan BKIPM Aceh, yakni Menggunakan sarana angkutan darat mobil thermoking dan tong fiber menggunakan es curai gunan mengangkut ikan tongkol, layang, surimi, manyung, lemuru, jahan, cumi, cakalang, kembung, bandeng, salem, tenggiri.
- Pengawasan pemanfaatan ekosistem mangrove: Pengawasan pemanfaatan spesies dilindungi yang terdiri dari ikan Arwana dan ikan Botia di Kota Banda Aceh serta Pengawasan destructive fishing penggunaan kompresor yang dicurigakan menggunakan BOM dalam penangkapan ikan di laut.
- Penanganan Pelanggaran Bidang KP.
 - Terdapat 3 kapal Malaysia yang ditangkap oleh Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo pada tanggal 2 Februari 2019 (2 unit kapal berukuran 63 GT dan 64 GT) dan Juni 2019 (1 unit kapal berukuran 64 GT).
 - Status inkraht dirampas untuk negara (1 unit) serta dirampas untuk dimusnahkan 2 unit.
 - 9 Awak Kapal *Non Justitia* yang ditangani.



- Tantangan PSDKP ke depan:
 - Perlu peningkatan hari operasi untuk kapal pengawas dan *speed boat* pengawas.
 - Perlu peningkatan jumlah dan kapasitas SDM Pengawasan SDKP.
 - Perlu peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas).
 - Perlu peningkatan kepatuhan kapal perikanan berukuran < 30 GT yang belum terdaftar dari Pemda c.q. Dinas KP.
 - Perlu penguatan infrastruktur pengawasan, antara lain: (i) armada *speedboat* pengawasan (ii) dukungan lahan atau bangunan kantor dari Pemda, dan (iii) kendaraan operasional pengawas.
 - Perlu peningkatan kegiatan penyadartahuan kepada masyarakat tentang pemanfaatan SDKP.

I. BUMN PERTANIAN

Perum Bulog

Perum Bulog merupakan salah satu mitra Komisi IV DPR RI yang bergerak di bidang logistik pangan. Perum Bulog diamanahkan oleh Pemerintah untuk tetap melakukan kegiatan pengontrolan harga dasar pembelian untuk gabah, stabilisasi harga khususnya harga pokok, dan pengelolaan stok pangan. Dalam melindungi harga gabah/beras petani, Perum Bulog melakukan penyerapan sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah/Beras dan Penyaluran Beras oleh Pemerintah, Perum Bulog melaksanakan kebijakan pengadaan gabah/beras melalui pembelian gabah/beras dalam negeri dengan ketentuan Harga Pembelian Pemerintah. Tahun 2019 (Januari s.d. Desember 2019), Perum Bulog telah melakukan pengadaan dalam negeri di kantor wilayah seluruh Indonesia dalam bentuk gabah maupun beras dengan rata-rata di atas 75% (per tanggal 16 Desember 2019) (Gambar 1).

Gambar 1. Realisasi pengadaan Dalam Negeri Kantor Wilayah Seluruh Indonesia Tahun 2019 Januari s.d. Desember 2019

No	Kanwil	Target 2019 (Str Beras)		Order	Total realisasi		% 1 Tahun
		Jan-Des	Jan-Des		str gabah	str beras	
1	KALBAR	1.905	1.905	4.056	7.503	3.751	196,89%
2	SULTRA	12.245	12.245	17.619	34.845	17.422	142,28%
3	RIAU & KEPRI	4.416	4.416	6.862	11.802	5.901	133,63%
4	N.T.T	6.246	6.246	8.459	16.238	8.119	130,00%
5	MALUKU & MALUT	1.746	1.746	2.217	4.433	2.217	126,98%
6	JABAR	202.429	202.429	226.189	445.192	222.596	109,96%
7	SUMUT	20.433	20.433	21.474	41.931	20.966	102,61%
8	KALTIM & KALTARA	5.000	5.000	4.988	9.354	4.677	93,54%
9	PAPUA & PABAR	48.747	48.747	39.060	77.623	38.812	79,62%
10	SULSEBAR	290.920	290.920	220.296	429.463	214.731	73,81%
11	KALTENG	5.222	5.222	3.908	7.552	3.776	72,31%
12	SUMSEL & BABEL	70.570	70.570	51.496	100.736	50.368	71,37%
13	JATIM	351.215	351.215	244.213	477.376	238.688	67,96%
14	SULTENG	32.673	32.673	19.104	37.764	18.882	57,79%
15	SULUT & GORONTALO	4.252	4.252	2.304	4.603	2.302	54,14%
16	N.T.B	141.654	141.654	77.114	150.773	75.386	53,22%
17	BENGKULU	8.746	8.746	4.566	8.931	4.466	51,06%
18	LAMPUNG	102.079	102.079	52.486	102.685	51.343	50,30%
19	JAMBI	10.245	10.245	5.390	10.151	5.075	49,54%
20	SUMBAR	10.245	10.245	4.757	9.475	4.737	46,24%
21	JATENG	290.398	290.398	129.557	246.103	123.052	42,37%
22	DKI JAKARTA & BANTEN	39.794	39.794	17.582	33.105	16.553	41,60%
23	KALSEL	28.245	28.245	11.569	22.935	11.468	40,60%
24	BALI	9.845	9.845	3.720	7.431	3.715	37,74%
25	DI. YOGYA	89.376	89.376	33.902	64.167	32.084	35,90%
26	ACEH	38.828	38.828	7.084	13.651	6.826	17,58%
JUMLAH		1.827.475	1.827.475	1.219.975	2.375.825	1.187.912	65,00%

Khusus Provinsi Aceh, Perum Bulog telah melakukan penyerapan di seluruh wilayah. Berikut ini adalah realisasi pengadaan gabah/beras Perum Bulog Kantor Wilayah Aceh per tanggal 16 Desember 2019 (Gambar 2).

Gambar 2. Realisasi Pengadaan Kantor Wilayah Aceh

NO	KANTOR WILAYAH/KANTOR CABANG	2018		2019	
		TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI
1	ACEH	6700	2.529	5.653	386
2	LHOKSEUMAWE	6.776	571	6.017	1.702
3	TAKENGO	916	137	1.436	555
4	LANGSA	4.679	457	4.809	715
5	MEULABOH	5.580	3.977	5.809	1.648
6	SIGLI	8.768	2.436	7.033	1.252
7	KUTACANE	2.220	125	3.028	356
8	BLANGPIDIE	4.360	600	5.043	210
TOTAL		40.000	10.834	38.828	6.826

Kementerian Sosial telah melakukan keputusan dalam kebijakan transformasi bantuan pangan beras sejahtera (rastra) ke Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) pada awal bulan September 2019. Kebijakan ini merupakan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 63 tahun 2017. Berikut ini adalah data penyaluran bansos rastra untuk kantor wilayah seluruh Indonesia pada Tahun 2019 (1 Januari 2019 s.d. 16 Desember 2019) (Gambar 3), penyaluran bansos rastra wilayah Aceh (Gambar 4), dan penyaluran beras dan

telur dari Perum Bulog untuk mendukung program BPNT di wilayah Aceh (Gambar 5).

Gambar 3. Penyaluran Bansos Rastra Kantor Wilayah Seluruh Indonesia Tahun 2019

Satuan : Kg

NO	KANWIL	SPP	REALISASI DO TERBIT	PENERIMAAN MBA-1 DI PUSAT	MBA-1 Belum Diterima	%	%
						DO / SPP	MBA / DO
1	JABAR	9,493,720	9,493,720	9,493,720	-	100.00%	100.00%
2	LAMPUNG	18,539,400	18,539,400	18,539,400	-	100.00%	100.00%
3	DKI JAYA	12,950,960	12,950,960	12,950,960	-	100.00%	100.00%
4	BALI	2,578,530	2,578,530	2,578,530	-	100.00%	100.00%
5	BENGKULU	6,102,570	6,102,570	6,102,570	-	100.00%	100.00%
6	SULTRA	10,344,400	10,344,400	10,344,400	-	100.00%	100.00%
7	JAMBI	7,458,190	7,458,190	7,458,190	-	100.00%	100.00%
8	SUMUT	21,099,810	21,099,810	21,099,810	-	100.00%	100.00%
9	NTB	15,773,140	15,773,140	15,773,140	-	100.00%	100.00%
10	KALSEL	5,458,810	5,458,810	5,458,810	-	100.00%	100.00%
11	SUMSEL	22,561,240	22,561,240	22,561,240	-	100.00%	100.00%
12	SULUT	8,091,170	8,091,170	8,091,170	-	100.00%	100.00%
13	SULSEL	18,358,350	18,358,350	18,358,350	-	100.00%	100.00%
14	SULTENG	15,141,310	15,141,310	15,141,310	-	100.00%	100.00%
15	KALTENG	5,358,510	5,358,510	5,358,510	-	100.00%	100.00%
16	NTT	34,249,570	34,249,570	34,249,570	-	100.00%	100.00%
17	MALUKU	12,088,590	12,088,590	12,088,590	-	100.00%	100.00%
18	KALBAR	14,795,060	14,795,060	14,795,060	-	100.00%	100.00%
19	JATIM	21,341,480	21,341,480	21,341,480	-	100.00%	100.00%
20	ACEH	19,921,390	19,921,390	19,921,390	-	100.00%	100.00%
21	RIAU	15,254,220	15,254,220	15,254,220	-	100.00%	100.00%
22	SUMBAR	10,868,860	10,868,860	10,868,860	-	100.00%	100.00%
23	KALTIM	5,157,430	5,134,970	5,134,970	-	99.56%	100.00%
24	PAPUA	40,186,880	38,883,640	38,883,640	-	96.76%	100.00%
Jumlah		353,173,590	351,847,890	351,847,890	-	99.62%	100.00%

Note:

SPP = Surat Perintah Penyaluran

DO = *Delivery Order*

MBA-1= Model Berita acara pelaksanaan Raskin yang rekapitulasinya dibuat oleh SubDivre sebagai dokumen yang akan dilaporkan kepada Divre.

Gambar 4 Penyaluran Bansos Rastra Kantor Wilayah Aceh

2019

No	Kanwil/Kanca	REALISASI BANSOS RASTRA									TOTAL SALUR BANSOS RASTRA (KG)		
		JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	SPP	DO	%
I	KW. Aceh	282,320	282,320	282,320	282,320	282,320	282,320	282,320	281,160		2,257,400	2,257,400	100%
II	KC. L. Seumawe	893,930	893,930	893,930	893,930	893,930	-	-	-		4,469,650	4,469,650	100%
III	KCP. Takengon	139,120	139,120	139,120	139,120	139,120	-	-	-		695,600	695,600	100%
IV	KC. Langsa	277,300	277,300	277,300	277,300	277,300	-	-	-		1,386,500	1,386,500	100%
V	KC. Meulaboh	467,840	467,840	467,840	467,840	467,840	467,840	467,840	467,790		3,742,670	3,742,670	100%
VI	KC. Sigli	549,200	549,200	549,200	549,200	549,200	411,030	406,750	406,750		3,970,530	3,970,530	100%
VII	KC. Kutacane	202,630	202,630	202,630	202,630	202,630	202,630	202,630	202,630		1,621,040	1,621,040	100%
VIII	KCP. Biang Pidie	222,250	222,250	222,250	222,250	222,250	222,250	222,250	222,250		1,778,000	1,778,000	100%
JUMLAH TOTAL		3,034,590	3,034,590	3,034,590	3,034,590	3,034,590	1,586,070	1,581,790	1,580,580	-	19,921,390	19,921,390	100%

Gambar 5. Penyaluran BPNT Wilayah Aceh

NO	KAWIL	KOMODITI	PAGU s/d Des 2019		PENJUALAN BPNT s/d 15 Des 2019				TOTAL PENJUALAN BPNT s/d 15 Des 2019		PERSENTASE ATAS PAGU	
			KPM	Kg*)	Melalui PPK, E-Warong dan Agen		Melalui Distributor		Kg	Rp		%
					Kg	Rp	Kg	Rp				
1	ACEH	BERAS	221,314	6,639,420	2,793,169	29,747,889,369	.	.	2,793,169	29,747,889,369	42,07%	
		TELUR			12,651	151,812,000	.	.	12,651	151,812,000		

*) asumsi 5 kg beras per KPM

Sumber data : aplikasi penjualan langsung dan SIL

Selain itu, beras yang ada di gudang Perum Bulog pemanfaatannya disalurkan untuk Operasi Pasar (OP) dan Bencana. Beras tersebut merupakan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang setiap tahunnya memperoleh persetujuan anggaran dari Komisi IV DPR RI. Berikut ini adalah laporan pemanfaatan CBP di kantor wilayah Seluruh Indonesia per 16 Desember 2019 (Gambar 6).

**Gambar 6. Pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP)
Kantor Wilayah Seluruh Indonesia**

(satuan : kg)

No	KANTOR WILAYAH	2018			2019		
		JUMLAH			JUMLAH		
		OP	BENCANA	TOTAL	OP	BENCANA	TOTAL
1	ACEH	8,238,404.24	14,951.00	8,253,355.24	6,110,054.20	66,325.20	6,176,379.40
2	SUMUT	16,337,052.10	93,399.40	16,430,451.50	18,092,437.71	6,168.80	18,098,606.51
3	RIAU	6,256,342.00	-	6,256,342.00	22,201,236.20	9,270.00	22,210,506.20
4	SUMBAR	3,259,730.20	-	3,259,730.20	5,849,571.00	16,609.60	5,866,180.60
5	JAMBI	5,302,005.00	-	5,302,005.00	14,012,716.40	11,850.00	14,024,566.40
6	SUMSEL	5,580,270.00	85,692.00	5,665,962.00	25,862,969.50	68,470.40	25,931,439.90
7	BENGGULU	2,006,325.00	-	2,006,325.00	4,461,718.00	108,068.00	4,569,786.00
8	LAMPUNG	7,161,972.87	174,553.40	7,336,526.27	21,945,732.00	57,632.60	22,003,364.60
9	DKI	46,084,611.00	50,000.00	46,134,611.00	60,034,495.00	45,000.00	60,079,495.00
10	JABAR	45,517,963.67	157,324.20	45,675,287.87	74,318,675.45	78,313.20	74,396,988.65
11	JATENG	33,327,867.50	156,617.00	33,484,484.50	41,328,010.82	186,267.20	41,514,278.02
12	DIY	2,517,510.00	-	2,517,510.00	17,263,892.75	-	17,263,892.75
13	JATIM	74,984,455.67	90,129.40	75,074,585.07	89,723,893.59	113,460.00	89,837,353.59
14	KALBAR	4,683,773.00	48,342.00	4,732,115.00	9,800,884.62	34,489.20	9,835,373.82
15	KALTM	4,499,421.72	1,321.60	4,500,743.32	4,865,659.23	-	4,865,659.23
16	KALSEL	5,691,856.00	36,855.20	5,728,711.20	5,275,605.58	37,685.60	5,313,291.18
17	KALTENG	1,966,138.00	66,372.40	2,032,510.40	1,833,213.75	-	1,833,213.75
18	SULUT	1,867,469.00	305,135.00	2,172,604.00	4,135,956.20	554,158.60	4,690,114.80
19	SULTENG	3,965,924.87	9,016.00	3,974,940.87	4,662,607.78	-	4,662,607.78
20	SULTRA	3,680,372.29	310,598.80	3,990,971.09	7,487,557.45	396,708.00	7,884,265.45
21	SULSEL	4,746,350.72	95,560.40	4,841,911.12	50,936,863.01	111,437.60	51,048,300.61
22	BALI	971,470.00	307,616.80	1,279,086.80	1,543,475.00	-	1,543,475.00
23	NTB	10,031,883.80	25,872.00	10,057,755.80	16,962,374.48	56,506.80	17,018,881.28
24	NTT	10,788,942.00	400,429.60	11,189,371.60	14,240,042.00	1,315,801.00	15,555,843.00
25	MALUKU	3,378,945.22	108,000.80	3,486,946.02	6,656,056.92	632,379.20	7,288,436.12
26	PAPUA	6,065,481.94	38,724.00	6,104,205.94	10,817,032.51	461,850.00	11,278,882.51
JUMLAH		318,912,537.81	2,576,511.00	321,489,048.81	540,422,731.15	4,368,451.00	544,791,182.15

Di Provinsi Aceh, beras yang berasal dari Cadangan Beras Pemerintah Tahun 2019 digunakan untuk stabilisasi harga dan bencana alam per 16 Desember 2019 (Gambar 7 & 8).

**Gambar 7. Realisasi Ketersediaan Pasokan & Stabilisasi Harga (KPSH)
Beras Medim CBP Tahun 2019 (Kg)**

NO	KANWIL	JANUARI	PEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOPEMBER	DESEMBER	JUMLAH
1	KW. Aceh	267,200.00	40,500.00	8,700.00	8,952.00	8,400.00	0.00	17,550.00	17,150.00	19,450.00	17,450.00	53,650.00	54,200.00	513,202.00
2	KC. L.Seumawe	134,150.00	29,050.00	8,800.00	3,770.00	3,790.00	0.00	8,290.00	11,710.00	16,720.00	54,470.00	18,840.00	28,500.00	318,090.00
3	KCP. Takengon	15,916.00	2,500.00	8,380.00	1,300.00	1,500.00	950.00	8,860.00	4,850.00	6,050.00	5,050.00	5,500.00	5,550.00	66,406.00
4	KC. Langsa	405,500.00	59,600.00	8,600.00	10,500.00	20,750.00	5,000.00	13,000.00	19,250.00	52,100.00	46,700.00	65,600.00	187,550.00	894,150.00
5	KC. Meulaboh	343,000.00	152,000.00	0.00	3,100.00	2,520.00	0.00	2,100.00	4,972.00	5,600.00	92,330.00	104,150.00	256,650.00	966,422.00
6	KC. Sigli	206,530.00	140,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	9,500.00	80,500.00	69,000.00	242,700.00	250,300.00	1,028,530.00
7	KC. Kutacane	70,000.00	107,950.00	74,650.00	107,150.00	43,800.00	0.00	86,005.20	103,050.00	116,500.00	158,150.00	136,069.00	64,501.00	1,067,825.20
8	KCP. Blang Pidie	150,970.00	291,400.00	10,100.00	24,500.00	4,184.00	0.00	6,650.00	7,000.00	17,200.00	233,700.00	410,175.00	99,550.00	1,255,429.00
JUMLAH		1,593,266.00	823,000.00	119,230.00	159,272.00	114,944.00	5,950.00	142,455.20	177,482.00	314,120.00	676,850.00	1,036,684.00	946,801.00	6,110,054.20

Gambar 8. Realisasi Penyaluran CBP Bencana Alam Tahun 2019 (Kg)

NO	KANWIL	JANUARI	MARET	AGUSTUS	OKTOBER	NOPEMBER	JUMLAH
1	KC. Meulaboh	-	1,008	-	627	-	1,635.20
2	KC. Kutacane	30,996	-	-	-	-	30,996.00
3	KCP. Blang Pidie	-	-	11,534	-	22,160	33,694.00
JUMLAH		30,996.00	1,008.00	11,534.00	627.20	22,160.00	66,325.20

Berdasarkan penjelasan di atas, Perum Bulog di Provinsi Aceh memiliki total persediaan beras per tanggal 16 Desember 2019 yaitu 21.669 ton dengan total beras CBP sebesar 21.569 ton dan beras komersial sebesar 99 ton (Gambar 9).

Gambar 9. Posisi Persediaan Beras 2019 Kantor Wilayah Aceh

NO	UNIT KERJA	BERAS CBP	BERAS KOMERSIAL	TOTAL
1	Kanwil Aceh	2.879	-	2.879
2	Kanca Lhokseumawe	8.249	-	8.249
3	KCP Takengon	163	4	167
4	Kanca Langsa	3.936	-	3.936
5	Kanca Meulaboh	1.206	-	1.206
6	Kanca Sigli	2.565	24	2.589
7	Kanca Kutacane	842	41	883
8	Kanca Blang Pidie	1.729	31	1.760
JUMLAH		21.569	99	21.669

PT Pupuk Indonesia *Holding Company (Pupuk Iskandar Muda)*

PT PIHC merupakan satu-satunya BUMN yang diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk menyalurkan pupuk bersubsidi yang dibutuhkan petani sesuai dengan RDKK yang telah terdata oleh Kementerian Pertanian. Alokasi, realisasi, dan persediaan Nasional untuk pupuk bersubsidi yang telah dilakukan oleh PT PIHC (Gambar 10) dan alokasi, realisasi, dan stok di Provinsi Aceh (Gambar 11):

Gambar 10. Alokasi, realisasi, dan stok Nasional (per 15 Desember 2019)

NO	JENIS PUPUK	ALOKASI	REALISASI	% SALUR	STOK LINI III-IV	STOK MINIMUM	% STOK
	1	2	3	4 = 3 : 2	5	6	7 = 5 : 6
1	UREA	3.825.000	3.563.557	93%	696.393	313.790	222%
2	NPK	779.000	738.078	95%	405.265	174.718	232%
3	SP36	996.000	909.564	91%	178.112	49.171	362%
4	ZA	2.326.000	2.228.717	96%	122.448	57.463	213%
5	ORGANIK	948.000	693.433	73%	68.916	61.695	112%
TOTAL		8.874.000	8.133.348	92%	1.471.135	656.837	224%

**Gambar 11. Alokasi, Realisasi, dan Stok Provinsi Aceh
(per 15 Desember 2019)**

NO	JENIS PUPUK	ALOKASI	REALISASI	% REALISASI	STOK LINI III-IV	STOK MINIMUM	% STOK
	1	2	3	4 = 3 : 2	5	6	7 = 5 : 6
1	UREA	55.900	54.615	98%	41.806	6.221	672%
2	NPK	37.500	37.010	99%	4.031	4.173	97%
3	SP36	22.350	19.245	86%	1.695	2.487	68%
4	ZA	14.660	11.628	79%	1.570	1.632	96%
5	ORGANIK	7.010	6.546	93%	929	780	119%
TOTAL		137.420	129.045	94%	50.032	15.294	327%

Dalam menyelenggarakan penyaluran pupuk bersubsidi, Anggaran dan kuantum pupuk bersubsidi mengalami penurunan, khususnya dalam 5 tahun terakhir:

1. Tahun 2015 DIPA pupuk bersubsidi sebesar Rp28.255.445.000.000,00 dengan volume 9.550.000 ton;
2. Tahun 2016 DIPA pupuk bersubsidi sebesar Rp30.063.194.000.000,00 dengan volume 9.550.000 ton;
3. Tahun 2017 DIPA pupuk bersubsidi sebesar Rp31.153.369.000.000,00 dengan volume 9.550.000 ton;
4. Tahun 2018 DIPA pupuk bersubsidi sebesar Rp28.503.965.000.000,00 dengan volume 9.550.000 ton;
5. Tahun 2019 DIPA pupuk bersubsidi sebesar Rp29.503.225.000.000,00 dengan volume 8.874.000 ton.

Pemerintah melalui Kementerian Pertanian masih memiliki kewajiban pembayaran utang sebesar Rp14.387.210.000.000,00 dengan rincian (Gambar 12):

**Gambar 12. Posisi Piutang Subsidi Kepada Pemerintah
per November 2019**

(Rp Juta)

Tahun	PKG	PKT	PSP	PKC	PIM	Piutang Subsidi Sebelum PPN	PPN	Piutang Subsidi Setelah PPN
2017	-	21.131	-	1.153	18.699	40.983	4.098	45.081
2018	3.485.966	692.457	673.681	341.408	0	5.193.512	519.351	5.712.864
2019 (November)	4.762.831	929.165	1.069.657	431.377	651.756	7.844.786	784.479	8.629.265
Total	8.248.797	1.642.754	1.743.338	773.938	670.455	13.079.282	1.307.928	14.387.210

Isu Strategis Pupuk Bersubsidi

- Potensi terjadi kelangkaan pupuk bersubsidi yang disebabkan berkurangnya alokasi pupuk bersubsidi yang semula 9,5 juta ton di Tahun 2018 menjadi sebesar 8,8 juta ton di Tahun 2019. Potensi kelangkaan kemungkinan dapat terjadi di tahun 2020 karena alokasi yang ditetapkan pemerintah turun kembali menjadi 7,9 juta ton.

- Total kebutuhan pupuk bersubsidi yang tertuang dalam usulan RDKK oleh kelompok tani jauh lebih besar dibandingkan dengan alokasi yang ditetapkan. Usulan kebutuhan 2019 sebesar 23 juta ton namun alokasi yang ditetapkan hanya 8,87 juta ton.
- Penundaan pembayaran subsidi di wilayah (40 kecamatan), yang memiliki alokasi pupuk bersubsidi dikarenakan terdapat koreksi atas luas lahan sawah oleh ATR/BPN
- Peningkatan anggaran subsidi disebabkan karena:
 - Tingginya harga gas
 - Gas dibayar dalam mata uang USD
 - Piutang subsidi yang terlambat dibayar oleh Pemerintah yang berdampak pada kenaikan biaya bunga yang menjadi beban subsidi
 - Harga Eceran Tertinggi (HET) yang tidak berubah sejak 2012

PTPN I

PTPN I merupakan BUMN Perkebunan kelapa sawit dan karet yang mengelola 4 kebun sawit dan 2 kebun campuran (sawit dan karet) (Gambar 13) yang tersebar di Provinsi Aceh serta mengoperasikan 3 pabrik kelapa sawit dengan total kapasitas 120 ton TBS/jam. Bisnis unit yang dimiliki oleh PTPN I antara lain 6 kebun sawit, 2 kebun karet, 3 pabrik kelapa sawit (1 PKS dengan 30 ton/jam dan 2 PKS dengan 45 ton/jam), serta 1 rumah sakit.

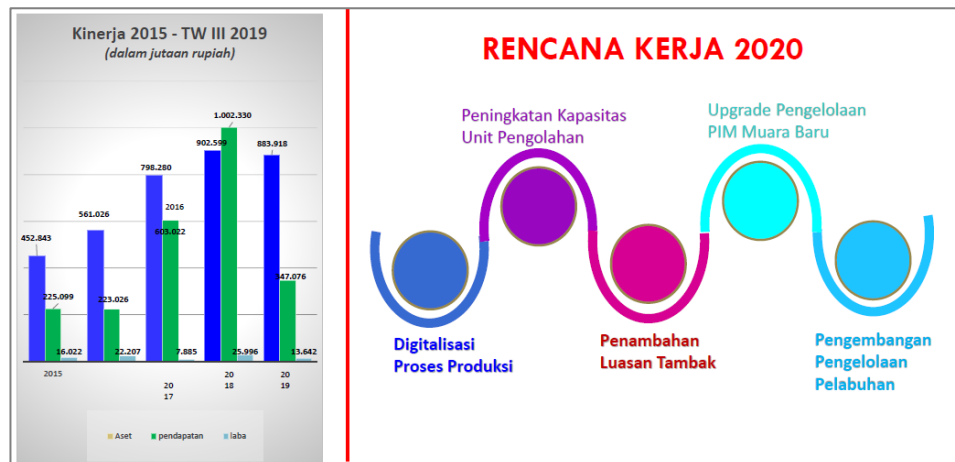
Gambar 13. Komoditas yang Diproduksi PTPN I

Komoditi	Tahun 2018 (Ha)				
	TM	TBM	TTI	Bibitan	Total
Kelapa sawit	22.312	3.693,5	1.649	50	27.704,5
Karet	100	670	-	11	781

Perum Perikanan Indonesia (Perindo)

- a) Penamaan Perum Perikanan Indonesia berdasarkan PP Nomor 9 Tahun 2013.
- b) Terdapat 5 cabang yakni di Belawan, Jakarta, Pekalongan, Brondong, dan Pemangkat).
- c) Terdapat 22 unit (perdagangan, operasi kapal, pengelolaan CS/UP, tambak dan KJA).
- d) Terdapat 5 unit pengembangan untuk tahun 2020 di Gunung Kidul, Banyuwangi, Takalar, dan Safe NTB.
- e) Usaha Perum Perindo:
 - Bidang Pra-produksi untuk tambak labuh, pemanfaatan lahan industri, *docking*, pabrik es, *coldstorage*, BBM, air bersih, telepon, listrik, jaringan data.
 - Bidang Budi Daya untuk tambak udang, tambak bandeng, pabrik pakan, keramba jaring apung (KJA).

- Bidang Pengoperasian Kapal untuk penangkapan ikan dan pengangkutan ikan.
 - Bidang Pemasaran untuk perdagangan dan pengolahan ikan hasil laut serta untuk ekspor impor.
- f) Kinerja 2015 – 2019 Triwulan III dan Rencana Kerja 2020, sebagai berikut:



- g) Gambaran umum Perum Perindo di Lampulo.
- Lahan 4,5 ha.
 - Perdagangan ikan.
 - Akan dibangun *docking & mobile cold storage*.
- h) Gambaran umum Perum Perindo di Lampulo.



Pembelian ikan dari nelayan di Lampulo, Simeulue dan sekitarnya



Akan membangun dok di Lampulo dengan teknologi modern



Mengelola Integrated Cold Storage di Simeulue (finalisasi draft perjanjian dengan Pemkab Simeulue)

J. TAMAN WISATA ALAM (TWA) PULAU WEH

Taman Wisata Alam (TWA) Pulau Weh secara administratif terletak di Kota Sabang Provinsi Aceh. TWA Pulau Weh terletak di ujung barat wilayah Indonesia. Kawasan ini ditunjuk pertama kali sebagai kawasan TWA melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 928/Kpts/Um/12/1982 tentang Penunjukan Gugusan Pulau Weh beserta Perairan Laut di sekitarnya seluas 3.900 Ha termasuk pulau Rubiah dan Pulau

Seulako menjadi taman Wisata Alam dengan nama Taman Wisata (Laut) Pulau Weh. Pada Tahun 2014 kawasan ini ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor SK.3919/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Pada Kelompok Hutan Pulau Weh seluas 9.701,74 (Sembilan Ribu Tujuh Ratus Satu Ribu dan Tujuh Puluh Empat Perseratus) Ha di Kota Sabang Provinsi Aceh. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki 10 cara baru dalam mengelola kawasan konservasi diantaranya: masyarakat sebagai subyek, penghormatan pada HAM, kerjasama lintas Eselon I, kerjasama lintas Kementerian, penghormatan nilai budaya dan adat, kepemimpinan multilevel, pengambilan keputusan berbasis sains, pengelolaan berbasis resort, penghargaan dan pendampingan, dan organisasi pembelajaran.

- 1) Tugu Nol Kilometer. Tugu Nol Kilometer adalah monumen yang merupakan penanda geografis yang bermula di titik nol kilometer di sebelah barat Indonesia.
- 2) *Canopy Jungle Track*.
- 3) *Mangrove Eco Track*.
- 4) Wisata Bahari.

Permasalahan di Provinsi Aceh Lainnya

- Konflik Gajah Sumatera, Orangutan Sumatera, dan Harimau Sumatera di Provinsi Aceh Selama 3 Tahun Terakhir dan Upaya Penanggulangannya:
 - ✓ Berkurangnya habitat gajah:
 - Pembukaan hutan yang dijadikan kebun/budi daya dilakukan pada rute migrasi atau koridor gajah.
 - Habitat gajah sebagian besar pada daerah dataran rendah.
 - Gajah memiliki kebutuhan lahan yang sama dengan manusia karena gajah butuh makan yang banyak dalam areal yang luas.
 - ✓ Perburuan gading gajah masih marak terjadi.
 - ✓ Gajah dianggap sebagai "hama."
 - ✓ Upaya penanggulangan konflik satwa yang telah dilakukan (jangka pendek).
 - Gajah: penggiringan ke habitat, pembuatan barrier, pemasangan GPS Collar, pembangunan CRU, penyesuaian jenis tanaman dengan yang tidak disukai gajah, pembentukan desa mandiri konflik, sosialisasi, pembentukan *task force* multi pihak, dan pengkayaan pakan gajah di kawasan hutan.
 - Orang Utan: evaluasi, translokasi, reintroduksi, pembentukan KSM, dan sosialisasi.
 - Harimau: pengusiran, evaluasi, operasi sapu jerat, pembentukan KSM, pembuatan kandang anti serangan harimau, dan sosialisasi.
 - ✓ Penyesuaian jenis komodiiti yang dimakan oleh gajah.
 - ✓ Upaya penanggulangan konflik satwa (Jangka Panjang).
 - Pembentukan kawasan ekosistem esensial yang bertujuan untuk pembinaan habitat (lokasi di luar KSA, KPA, TB).

- **Perhutanan Sosial:**

- ✓ Pemerintah pada Tahun 2019 telah menargetkan untuk membangun perhutanan sosial di Provinsi Aceh sebesar 30.967 Ha namun dalam merealisasikan hal tersebut masih terdapat tantangan yang harus diatasi diantaranya optimalisasi kelompok kerja percepatan perhutanan sosial baru dimulai tahun 2018, minimnya tingkat pengakuan masyarakat dalam kawasan hutan, dan masyarakat merasa tenang walaupun beraktivitas dalam kawasan hutan.
- ✓ Tindak lanjut yang diupayakan oleh Pemerintah di Provinsi Aceh antara lain: pendampingan kepada kelompok tani (akses informasi, pengetahuan, infrastruktur, modal, dan pasar), pengelolaan kawasan hutan melalui *agroforestry* dan jasa lingkungan, khususnya wisata alam dan jasa air/aliran air, akses ke permodalan, serta jaminan pasar atau adanya *offtaker* yang siap membeli produk yang dihasilkan dari kelompok usaha perhutanan sosial.

- **Kawasan Konservasi di Provinsi Aceh:**

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melaksanakan upaya perlindungan dan pengelolaan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru dengan membangun beberapa cagar alam di Provinsi Aceh diantaranya Cagar Alam Pinur Jantho, Cagar Alam Sebojadi, Suaka Margasatwa Rawa Singkil, Taman Buru Lingga Isaq, Taman Wisata Alam dan Laut Pulau Weh, Taman Wisata Alam dan Laut Kep Banyak, Taman Wisata Alam Jantho, Taman Wisata Alam Kuta Malaka, dan Pusat Konservasi Gajah Aceh Saree.

K. SENTRA KELAUTAN DAN PERIKANAN TERPADU (SKPT) SABANG

- **Dasar Pelaksanaan Pembangunan**

- Nawa Cita ke-3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat Daerah-daerah dan Desa dalam kerangka negara kesatuan.
 - INPRES Nomor 7 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
 - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Industri Perikanan Nasional.
 - Permen KP. Nomor 48/permen-kp/2015 tentang Pedoman Umum Pembangunan SKPT di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.
 - Permen KP. NOMOR 51/KEPMEN-KP/2016 tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.
 - Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PERMEN-KP/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 40/Permen-Kp/2016 tentang Penugasan Pelaksanaan Pembangunan Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu di Pulau-Pulau Kecil dan Kawasan Perbatasan.
- Tujuan Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT) adalah ketahanan pangan, konsumsi ikan, ekspor hasil perikanan, dan

pendapatan/kesejahteraan masyarakat. Pembangunan sentra kelautan dengan berbasis pada iptek, modal, mitra, SDM, sarpras penunjang, bisnis proses, akses pasar, dan kelembagaan.

• Tantangan SKPT Sabang ke Depan

- Pengalihan asset lahan dan sarana PPI Le Meulee dimana Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 pengelolaan PPI merupakan kewenangan provinsi.
- Debit dari sumber mata air di lokasi PPI Le Meulee tidak mencukupi sehingga perlu dibangun instalasi air dari sumber PDAM.
- Saat ini penerbangan komersial ke Sabang terhenti sehingga perlu optimalisasi dan perpanjangan landasan pacu bandara.
- Pemanfaatan asset khususnya sarannya belum termanfaatkan secara baik karena masih dalam proses lelang ulang kepada investor (lelang I gagal).
- Kelembagaan pengelola belum terbentuk sehingga perlu pembentukan kelembagaan pengelola yang terintegrasi dengan PPS Lampulo.
- Pelabuhan Bebas Sabang sebagai pintu gerbang ekspor SKPT belum terwujud sehingga perlu adanya koordinasi dengan pihak Kemenhub, Kemendag BPKS Sabang.





REALISASI KEGIATAN SKPT SABANG 2017

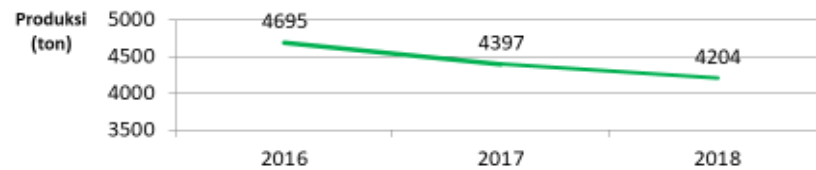
NO	KEGIATAN	VOL	SAT	REALISASI
1	Kapal 5 GT dan mesin	30	Unit	Selesai
2	Alat tangkap pancing <i>handline</i>	30	Paket	Selesai
3	Jalan masuk	1	paket	Selesai
4	Bangunan TPI	1	Unit	Selesai
5	MCK 8 pintu	1	unit	Selesai
6	<i>Integrated Cold Storage (ICS)</i> 100 ton	1	Unit	Selesai
7	Peralatan operasional ICS	1	Paket	Selesai
8	<i>Ice Flake Machine (IFM)</i> 10 ton	1	Unit	Selesai

REALISASI KEGIATAN SKPT SABANG 2018

NO	KEGIATAN	VOL	SAT	REALISASI
1	Kapal 10 GT dan mesin	1	Unit	Selesai
2	Alat tangkap pancing (<i>handline</i>)	30	Paket	Selesai
3	Metal detector (alat pelengkap di ICS)	1	unit	Selesai
4	Bantuan pakan untuk KJA Masyarakat	1	Paket	Selesai
5	Bantuan peralatan untuk KJA Masyarakat	1	Paket	Selesai
6	Bantuan bagan untuk KJA Masyarakat	1	Paket	Selesai
7	Penyusunan Dokumen lingkungan	1	Paket	Selesai
8	Penyusunan Perencanaan DED PPI le Meulee	5	Paket	Selesai

VOLUME DAN NILAI PRODUKSI IKAN SKPT SABANG 2016-2018

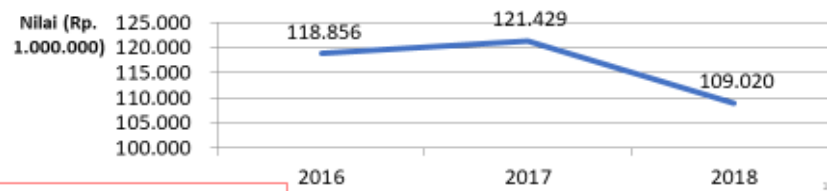
Volume



Keterangan :

1. Penurunan jumlah produksi disebabkan berkurangnya kapal ikan dari **682 unit (2016)** menjadi **576 unit (2018)** atau berkurang 112 unit.
2. Terjadi peningkatan produktifitas hasil tangkapan dari **6,88 ton/unit (2016)** menjadi **7,3 ton/unit (2018)**
3. Terjadi peningkatan pendapatan per unit kapal dari **Rp. 174,3 jt / unit (2016)** menjadi **Rp. 189.3 jt/unit (2018)**

Nilai



Sumber : Statistik DKP Sabang 2018

KEGIATAN SKPT SABANG 2019

NO	KEGIATAN	VOL	SAT	PROGRESS
1	Bantuan Kapal Perikanan 5 GT	15	Unit	• Proses distribusi kepada 4 kelompok nelayan
2	Penyusunan DED Prasarana SKPT (PPI Ie Meulee) hibah JICA	1	Paket	• Proses penyusunan dokumen.
3	Kegiatan pendukung	1	Paket	Monev, koordinasi, operasional SKPT, penyediaan jasa konsultan perencanaan

RENCANA KEGIATAN SKPT SABANG 2020-2021

NO	KEGIATAN	VOL	SAT	URAIAN KEGIATAN
1	Operasional SKPT	1	Paket	• Monev, koordinasi, pendampingan JICA • Penyediaan jasa konsultan pengawas pembangunan konstruksi
2	Pembangunan fisik Prasarana SKPT melalui hibah JICA (Tahap I/2020)	1	Paket	• Rencana Prasarana yang dibangun 2020 : Pos penjaga, pintu gerbang pelabuhan, reservoir dan tower air tawar, Ruang generator, Instalasi pengolah limbah (IPAL), Toilet umum, barak/tempat singgah nelayan, bengkel, slipway kapal, SPDN, kantor administrasi / pusat informasi/aula pertemuan nelayan, tempat docking kapal, gazebo, pasar ikan, pusat kuliner, jalan dan tempat parkir, pertamanan, dermaga, dan pengerukan kolam labuh.
3	Pembangunan fisik Prasarana SKPT melalui hibah JICA (Tahap II/2021)	2	Paket	Rencana Prasarana yang dibangun 2021 : Breakwater dan equipments



2. HASIL KUNJUNGAN KERJA

a. Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri Aceh

- **Aspirasi:**

- ✓ Lahan bersertifikat seluas 430 ha baru 209 ha yang digunakan belum memiliki pagar pembatas sepanjang 17 km sehingga hewan liar dan ternak masyarakat masih bisa masuk ke dalam wilayah BPTU-HPT.
- ✓ Masih terdapat lahan perbukitan (hutan) dan semak seluas 116 ha yang dapat direkonturing, diolah, dan ditanami rumput.
- ✓ Perlu dilakukan penyelesaian lahan seluas 105 ha yang telah menjadi sawah dan kebun yang diokupasi masyarakat.
- ✓ Perlu adanya pipanisasi dari sumber air alam sepanjang 7 km dan bak pengolahan air (*water treatment*).
- ✓ Efek dari gempa yang terjadi tahun 2005, BPTU-HPT membutuhkan rehab dan pengembangan gedung kantor, karena struktur bangunan sudah terjadi keretakan pada lantai dan dinding bangunan.

- **Tanggapan DPR RI**

- ✓ Konsep pertanian dan peternakan perlu diintegrasikan sehingga petani memiliki kegiatan produktif selain bersawah. Komisi IV DPR RI mendorong agar petani di Aceh mendapatkan bantuan anak sapi untuk dibesarkan.
- ✓ Dibutuhkan integrasi pertanian dan perdagangan dalam rangka mendukung kesejahteraan peternak sapi Aceh.

- ✓ Mendukung pengembangan sapi Aceh dan pakannya baik secara kualitas maupun kuantitasnya dalam rangka mendukung tercapainya swasembada protein hewani.
- ✓ Mendukung Pemerintah untuk mengembangkan Balai Pembibitan Ternak Unggul dan Hijauan Pakan Ternak di sentra ternak lainnya.

b. Pelabuhan Perikanan & Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Lampulo, Banda Aceh

Aspirasi:

- Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Lampulo, antara lain:
 - a) Perlu solusi terkait dengan masih terjadi pendangkalan/sedimentasi di perairan sekitar komplek Pelabuhan Lampulo dan juga di pelabuhan lainnya yang ada di Provinsi Aceh.
 - b) Perlu sarana dan prasarana di Pelabuhan Lampulo, seperti punya tempat *docking* kapal dan SPDN (*Solar Packed Dealer* Nelayan) Trafo.
- Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Lampulo, antara lain:
 - a) Perlu peningkatan pengawasan terkait dengan masih maraknya kapal asing yang beroperasi secara ilegal menangkap ikan di perairan Indonesia.
 - b) Perlu pendampingan terhadap kapal asing pelaku IUU *Fishing* yang ditangkap oleh pangkalan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, seperti:
 - 1) Tahun 2019 ditangkap 4 buah kapal berbendera Malaysia, dimana 3 disita untuk negara dan 1 masih proses penyidikan. Ke depan 1 Kapal latih rencana akan dihibahkan ke Universitas Syiah Kuala Aceh dan selanjutnya 2 kapal diputuskan dimusnahkan/ditenggelamkan.
 - 2) Alat tangkap dari kapal IUU *Fishing* tergolong alat tangkap ikan yang terlarang sehingga akan dimusnahkan.
 - 3) Anak Buah Kapal (ABK) masih ada 5 orang yang dalam proses hukum, selebihnya sudah di deportasi dengan total 18 ABK.

c. Pertemuan dan Ramah Tamah dengan Gubernur Aceh, Kepala Dinas, Ketua Kadin Aceh, Perum Bulog, PT Pupuk Indonesia, PT Perkebunan Nusantara I, dan Perum Perikanan Indonesia

• **Pemerintah Daerah**

Sesuai dengan perintah Presiden untuk membuka peluang investasi di Provinsi Aceh dalam rangka transformasi ekonomi. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah meminta dukungan DPR RI terkait dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokeumawe yang asetnya dibawah Kementerian Keuangan. Saat ini investor terkendala dalam penyewaan lahan di kawasan tersebut karena sesuai dengan peraturan sewa lahan hanya dibatasi sampai 5 tahun (harapannya dapat diperpanjang minimal 30 tahun).

- **Perum Perikanan Indonesia**
 - ✓ Meminta dukungan Pemerintah agar Perum Perindo dapat dipercaya kembali untuk mengelola 6 pelabuhan (sesuai dengan PP Tahun 2013).
 - ✓ Perindo meminta dukungan dari Komisi IV DPR RI terkait rencana pembangunan 5 unit pengembangan untuk tahun 2020 di Gunung Kidul, Banyuwangi, Takalar, dan Safe NTB.
- **Perum Bulog**
 - ✓ Meminta dukungan dari Pemerintah Daerah untuk mendukung Perum Bulog dalam menyalurkan beras ke program BPNT.
 - ✓ Perum Bulog akan melakukan peningkatan kinerja dengan memperbaiki kualitas seluruh beras menjadi beras berfortifikasi (baik untuk *stunting*).
 - ✓ Meminta dukungan dari pemerintah Daerah dan BUMN untuk memberikan peluang bagi Perum Bulog dalam menyalurkan beras ke program tunjangan ASN maupun ke BUMN.
- **Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan**
 - ✓ Terkait dengan satwa (badak, orangutan, harimau, dan gajah) di Aceh, pihak Kementerian telah melakukan patroli 15 hari per bulan dan selama 5 tahun menemukan 3000 jerat yang umumnya digunakan untuk menjerat babi, rusa, dll saat ini telah berdampak pada harimau, gajah, dll.
 - ✓ Di Aceh, perhutanan sosial potensinya 400 ha yang dapat diberikan kepada masyarakat selama 35 tahun.
- **Tanggapan Komisi IV DPR RI**
 - ✓ Meminta dukungan Pemerintah Daerah untuk bersama-sama mengatasi permasalahan industri beras yang dikelola oleh Perum Bulog.
 - ✓ Meminta PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang ada di Provinsi Aceh.
 - ✓ Meminta dukungan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan permasalahan irigasi.
 - ✓ Meminta kehadiran dari Perum Bulog untuk memberikan solusi dalam menampung beras/gabah petani.
 - ✓ Meminta Kementerian Kelautan dan perikanan untuk menindaklanjuti keluhan nelayan wilayah Lampulo yang fasilitasnya tidak memadai, lokasi kapal membutuhkan perhatian, permasalahan ijin kapal 30 GT perlu dikaji, permasalahan *cold storage* dan pasar yang tidak mendukung.
 - ✓ Meminta Pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan gajah dan diharapkan dapat menjadi ekowisata yang dapat meningkatkan perekonomian Provinsi Aceh.

- ✓ Komisi IV DPR RI mendukung agar dinas kehutanan responsif akan dukungan Pemerintah Pusat terkait dengan perhutanan sosial.
- ✓ Komisi IV DPR RI mendukung akan seluruh *stakeholder* agar berkoordinasi dalam upaya mendatangkan investasi dalam mengembangkan potensi perikanan Provinsi Aceh.
- ✓ Komisi IV DPR RI meminta perhatian dari KLHK untuk terkait Taman Nasional Gunung Leuser yang wilayah terbesarnya berada di Aceh namun kantornya berada di Sumatera Utara.

3. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

- 1) Arahan Komisi IV DPR RI kepada Kementerian Pertanian, antara lain:
 - a) Komisi IV DPR RI meminta PT Pupuk Indonesia dan Kementerian Pertanian agar segera berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk mengatasi kelangkaan pupuk yang ada di Provinsi Aceh.
 - b) Komisi IV DPR RI meminta dukungan Kementerian Pertanian untuk menyelesaikan permasalahan irigasi.
- 2) Arahan Komisi IV DPR RI kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan, antara lain:
 - a) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti dan mengkaji aspirasi hasil kunker reses di Provinsi Aceh, antara lain terkait dengan pendangkalan di beberapa Pelabuhan Perikanan di seluruh Aceh.
 - b) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk menindaklanjuti kapal asing hasil sitaan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal untuk dapat segera dihibahkan/diserahkan ke Universitas Syiah Kuala yang difungsikan sebagai kapal latihan, serta perlu ditingkatkan jumlah kapal pengawasnya, kecepatannya maupun segi kualitasnya. Selain itu, perlu diperbaiki pelabuhan perikanan, kualitas pasar pelelangan ikan, dan pemerintah menjamin stabilitas harga ikan.
 - c) Komisi IV DPR RI meminta kepada Pemerintah untuk meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Sentra Kelautan dan Perikanan terpadu (SKPT) di Sabang, mengingat Sabang merupakan salah satu adalah pintu gerbang bagian barat Indonesia.
 - d) Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Kelautan dan perikanan untuk menindaklanjuti keluhan nelayan wilayah Lampulo yang fasilitasnya tidak memadai, lokasi kapal membutuhkan perhatian, permasalahan ijin kapal 30 GT perlu dikaji, permasalahan *cold storage* dan pasar yang tidak mendukung.
- 3) Arahan Komisi IV DPR RI kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, antara lain:

Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah untuk segera menuntaskan permasalahan gajah dan diharapkan dapat menjadi ekowisata yang dapat meningkatkan perekonomian Provinsi Aceh.
- 4) Arahan Komisi IV DPR RI kepada Perum Bulog, antara lain:

Komisi IV DPR RI meminta kehadiran dari Perum Bulog untuk memberikan solusi dalam menampung beras/gabah petani.

- 5) Arahan Komisi IV DPR RI kepada Perum Perikanan Indonesia, antara lain:
Komisi IV DPR RI mendukung rencana pembangunan 5 unit pengembangan dari Perindo untuk tahun 2020 di Gunung Kidul, Banyuwangi, Takalar, dan Safe NTB.

4. PENUTUP

Demikian laporan yang dapat dilampirkan selama Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Aceh. Sesuai dengan pemaparan dan aspirasi yang telah dijelaskan oleh beberapa pihak, Komisi IV DPR RI akan menindaklanjuti hal tersebut dalam Rapat Kerja maupun Rapat Dengar Pendapat bersama mitra kerja Komisi IV DPR RI. Semoga kunjungan kerja yang telah dilakukan pada Masa Reses Persidangan I Tahun 2019-2020 dapat memberikan manfaat bagi kedaulatan Negara dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Aceh.

Jakarta, Desember 2019

Ketua Tim,

Dedi Mulyadi
A-294

LAMPIRAN MITRA KERJA

1. Kementerian Pertanian

- ✓ Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan = Dr. drh. I Ketut Diarmita, M.P.
- ✓ Direktur Pembiayaan Pertanian = Ir. Indah Megawati, M.P.

2. Kementerian Kelautan dan Perikanan

- ✓ Kepala Badan Karantina dan Pengendalian Mutu Hasil Perikanan = Dr. Rina, M.Si.
- ✓ Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan = Ir. Matheus Eko Rudianto. Mbus. IT.
- ✓ Direktur Kawasan dan Kesehatan Ikan = Ir. Arik Hari Wibowo, M.Si.
- ✓ Kepala Dinas Kelautan dan perikanan Aceh = Dr. Ir. Ilyas, M.P.
- ✓ Kepala Pengawasan Sumber Daya kelautan dan Perikanan = Basri, M.Si.
- ✓ Kepala Pelabuhan Perikanan = Oni Kandi, M.Si.

3. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

- ✓ Dirjen Konservasi dan Sumber Daya Alam dan Ekosistem = Ir. Wiratno, M.Sc.
- ✓ Direktur Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi = Ir. Asep Sugiharta, M.Sc.

4. PT Pupuk Indonesia

- ✓ Direktur Teknologi = M. Djohan Safri.

5. Perum Bulog

- ✓ Wakil Direktur Utama = Dr. Gatot Trihargo, Ak., MAFIS, CA, QIA, CFE.
- ✓ Kadivreg Perum Bulog Aceh = Irsan Nasution.

6. Perum Perikanan Indonesia

- ✓ Direktur Keuangan = M. Taufik.
- ✓ Kepala Divisi Pengembangan Usaha = Agung Pamujo.
- ✓ GM Cabang Belawan = Aryo Dewandaru.

LAMPIRAN MEDIA CETAK

KOMISI IV DPR RI DUKUNG KEMANTAN KEMBANGKAN SAPI ACEH

indopos.co.id – Anggota Komisi IV DPR RI memberikan perhatian dan dukungan kepada Kementerian Pertanian, khususnya Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) yakni Balai Pembibitan Ternak Unggul – Hijauan Pakan Ternak (BPTU – HPT) Indrapuri dalam mengembangkan ternak unggul Sapi Aceh dan pengembangan hijauan pakan ternak yang berkualitas. Hal tersebut disampaikan Ketua rombongan Komisi IV DPR RI, Dedi Mulyadi yang didampingi oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, I Ketut Diarmita saat melakukan serangkaian kunjungan kerja tiga hari yang dimulai pada tanggal 18 Desember 2019, dan salah satunya ke BPTU – HPT Indrapuri di Provinsi Banda Aceh.

“Kami mendukung pengembangan Sapi Aceh untuk terus ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya, sehingga dapat berkontribusi dalam swasembada protein hewani di Indonesia,” ungkapnya. Dedi juga menyampaikan bahwa Sapi Aceh terkenal karena dagingnya yang lezat, sedangkan sapihnya sendiri memiliki penampilan yang manis, dan jantannya mantap.

Kunjungan kerja rombongan anggota Komisi IV DPR ini disambut oleh Kepala BPTU – HPT Indrapuri, Vierman beserta jajaran. Dalam kunjungannya, Dedi Mulyadi berharap BPTU – HPT Indrapuri dapat terus meningkatkan produksi dan populasi ternak unggul, serta peningkatan kualitas pakan. Hal tersebut penting dalam upaya meningkatkan populasi ternak yang berkualitas di Indonesia dan dapat mewujudkan swasembada protein hewani.

“Kunjungan kerja ke Aceh bertujuan untuk melihat langsung, sekaligus memonitor dan mengevaluasi sampai sejauh mana perkembangan sektor peternakan yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya terkait dengan program Ditjen PKH, Kementan yang memiliki target meningkatkan populasi ternak sekaligus untuk mewujudkan swasembada protein hewani,” ungkapnya.

Ketua Komisi IV DPR RI beserta rombongan juga menyempatkan diri untuk berkeliling melihat aktivitas pegawai, Sapi Aceh, serta padang rumput yang ada di BPTU – HPT Indrapuri. Rombongan berkesempatan melepas Sapi Aceh yang sudah bersertifikat ke BBIB Singosari dan BIB Lembang untuk dijadikan pemacek dalam mendukung program peternakan.

“Setelah melihat ini semua, kami berikan dukungan, dan kalau bisa balai seperti ini juga dikembangkan ke daerah lain di Indonesia yang mempunyai sentra peternakan” kata Dedi Mulyadi.

Pada kesempatan tersebut Dirjen PKH, I Ketut Diarmita menjelaskan profil BPTU – HPT Indrapuri yang secara khusus hanya memelihara Sapi Aceh. Tercatat bahwa sampai tanggal 30 November 2019, populasi Sapi Aceh di balai tersebut mencapai 991 ekor yang terdiri dari dewasa jantan sebanyak 203 ekor, dewasa betina sebanyak 476 ekor, muda jantan sebanyak 99 ekor, muda betina sebanyak 88 ekor, anak jantan sebanyak 58 ekor, dan anak betina sebanyak 67 ekor. Adapun angka kebuntingan per November 2019 sebanyak 200 ekor, produksi bibit sebanyak 82 ekor, dan kelahiran ternak sebanyak 121 ekor.

Ketut juga menyampaikan berbagai jenis hijauan pakan ternak yang ada di Indrapuri yakni Rumput *Brachiaria Decumbens* (BD), Rumput *Braehiaria Hummidicla* (BH),

Rumput Benggala, Rumput Gajah Odot, Rumput Lampung, Ledisgotora Sp (Tarum), Lantoro Mini dan Indigofera.

Secara khusus, Ketut meminta balai untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan, karena ia masih melihat adanya lahan-lahan yang belum termanfaatkan untuk pengembangan sapi dan hijauan pakan ternak, bahkan masih ada bagian lahan yang belum dipagari sehingga hewan liar atau milik masyarakat dapat masuk ke kawasan.

“Saya juga minta fasilitas balai agar diperbaiki dan dilengkapi. Termasuk penyiapan akses ke sumber air melalui pipanisasi” pintanya.

Sementara Vierman menyampaikan bahwa BPTU – HPT Indrapuri telah meraih beberapa prestasi antara lain pada tahun 2018 meraih sertifikasi ternak LSPRO sebanyak 40 ekor, yang terdiri dari 32 ekor sapi jantan dan 8 ekor sapi betina. Adapun untuk tahun 2019, balai tersebut meraih sertifikasi ternak LSPRO sebanyak 57 ekor, yaitu terdiri dari jantan 20 ekor dan betina 37 ekor.

Vierman juga menyampaikan terima kasihnya atas kunjungan kerja Komisi IV DPR RI ini. “Kami tetap memohon dukungan dari Komisi IV DPR RI dalam membangun peternakan di Aceh,”ucapnya. (*)

Sumber:

<https://indopos.co.id/read/2019/12/21/212880/komisi-iv-dpr-ri-dukung-kementan-kembangkan-sapi-aceh/>.

KOMISI IV DPR RI KUNKER KE ACEH, SERAHKAN BANTUAN KKP SENILAI RP 10 MILIAR, INI RINCIANNYA

SERAMBINNEWS.COM, BANDA ACEH - Sejumlah Anggota Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Provinsi Aceh.

Kunjungan kerja ini berlangsung dari tanggal 18-22 Desember 2019, demikian rilis yang diterima Serambinews.com dari Tim Media Anggota DPR RI asal Aceh, Ir H TA Khalid MM.

Dalam Kunker kali ini, Komisi IV menyerahkan bantuan Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan jumlah totalnya Rp 10 miliar lebih kepada kelompok dan koperasi di Aceh.

Penyerahan bantuan ini dilakukan secara simbolis, pada Kamis (19/12/2019), di Komplek Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) PPI le Meulee, Kota Sabang.

Bantuan tersebut diserahkan oleh Ir. H. TA. Khalid, MM dan Muslim, SHi, MM, dua anggota Komisi IV DPR RI asal Aceh, serta Anggota Komisi IV lainnya.

Bantuan kepada sejumlah kelompok dan koperasi di beberapa kabupaten/kota di Aceh dengan jumlah anggaran totalnya Rp 10.484.787.000.

Penyerahan bantuan disaksikan oleh Kadis Kelautan dan Perikanan Provinsi Aceh Dr. Ir. Ilyas, MP dan Kadis Kelautan dan Perikanan Kota Sabang Zulfan, S.Pi.

Adapun jenis-jenis bantuan Dirjen Perikanan Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2019 berupa;

* 1 unit Excavator kepada Koperasi Susun Manjle Aceh Tenggara senilai Rp1.369.000.000,00.

* Pitap 1 paket kepada kelompok Beumuerat Pidie senilai Rp350.000.000,00.

- * 15 unit kapal 5 GT kepada 4 koperasi di Sabang senilai Rp7.125.000.000,00.
- * Bantuan benih ikan kepada 18 kelompok di 7 kabupaten senilai Rp270.147.000,00.
- * 57,6 ton pakan mandiri untuk 10 kelompok di Aceh Jaya dan Aceh Tenggara senilai Rp348.720.000,00.
- * Mesin dan bahan baku pakan (2 paket) untuk dua kelompok di Aceh Tenggara senilai Rp200.000.000,00.
- * Asuransi Pembudidaya 755 orang di Kabupaten Bireuen, Aceh Timur, Aceh Jaya, Pidie, dan Langsa senilai Rp300.420.000,00.
- * 4 paket bantuan bioflok lele untuk 4 kelompok di Aceh Besar dan Aceh Selatan sejumlah Rp521.500.000,00.

Kunker Komisi IV DPR RI terdiri dari 16 orang yang diketuai Dedi Mulyadi dengan Wakil Ketua Daniel Johan.

Adapun anggotanya adalah Effendi Sianipar, Sutrisno, Krisantus Kurniawan, Panggah Susanto, M. Salim Fakhry (Aceh), Budhy Setiawan, Endro Hermono, T.A. Khalid (Aceh), Sulaeman L. Hamzah, Farida Hidayati, Muslim (Aceh), Nur'aeni, Johan Rosihan, dan Fachry Pahlevi Kanggoasa.

Sumber:

<https://aceh.tribunnews.com/2019/12/20/komisi-iv-dpr-ri-kunker-ke-aceh-serahkan-bantuan-kkp-senilai-rp-10-miliar-ini-rinciannya?page=all>.

Sumber lainnya:

1. <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/27031/t/Komisi+IV+Serahkan+Bantuan+dari+KKP+kepada+Kelompok+dan+Koperasi+Nelayan+di+Aceh>
2. <https://independensi.com/2019/12/22/komisi-iv-dpr-ri-dukung-kementan-kembangkan-sapi-aceh/>
3. <https://atjehdaily.id/2019/12/19/komisi-iv-dpr-ri-serahkan-sejumlah-bantuan-kepada-nelayan-aceh-di-sabang/>
4. <http://bumn.go.id/ptpn1/berita/1-Direksi-PTPN-I-Menghadiri-Kunjungan-Komisi-IV-DPR-RI-di-Aceh>
5. <https://lintasnusantara.net/2019/12/dpr-ri-komisi-iv-melakukan-kunker-ke-provinsi-aceh/>
6. <https://sumateranews.co.id/kunker-ke-aceh-komisi-iv-dpr-ri-serahkan-bantuan-10-milyar-kementerian-kelautan-perikanan/>
7. <http://dpr.go.id/berita/detail/id/26994/t/Komisi+IV+Dorong+Integrasi+Konsep+Pertanian+dengan+Peternakan>
8. <https://www.antaraneews.com/berita/1215016/tolak-ekspor-benih-lobster-komisi-iv-dpr-tekankan-konservasi-laut>
9. <https://www.jpnn.com/news/komisi-iv-dpr-dukung-kementan-kembangkan-ternak-unggul-sapi-aceh>
10. <http://dpr.go.id/berita/detail/id/26995/t/Komisi+IV+Apresiasi+Penangkapan+Kapa+Asing+oleh+Petugas+PSDKP+Lampulo>
11. <https://www.facebook.com/DPRRI/posts/tim-kunjungan-kerja-komisi-iv-dpr-ri-yang-dipimpin-wakil-ketua-komisi-iv-dpr-ri-/2393989924035152/>
12. https://www.youtube.com/watch?v=ZQ9fiMn3g4_warta_parlemen_-_dpr_ri_-_dpr_dorong_kkp_atasi_pendangkalan_pelabuhan_lampulo
13. <https://regional.kompas.com/read/2019/12/19/09054871/dedi-mulyadi-prihatin-kapal-pengawas-di-aceh-jadul-sedangkan-milik-pencuri?page=all>

14. <https://jabar.sindonews.com/read/13474/1/dedi-nilai-sarana-penunjang-pengawasan-laut-perlu-ditingkatkan-1576775530>
15. <https://www.annews.co.id/2019/12/irh-ta-khalid-mm-dp-ri-komisi-iv-kunker.html>
16. <https://www.dialeksis.com/Aceh/15-anggota-dpr-ri-berkunjung-ke-aceh-ini-agendanya/index.php>
17. <https://aceh.tribunnews.com/2019/12/20/anggota-komisi-iv-dpr-ri-kunker-ke-sabang-serahkan-bantuan-senilai-rp-10-miliar-lebih>
18. <https://aceh.tribunnews.com/2019/12/20/anggota-komisi-iv-dpr-ri-kunker-ke-sabang-serahkan-bantuan-senilai-rp-10-miliar-lebih?page=all>
19. <https://atjehdaily.id/2019/12/19/komisi-iv-dpr-ri-serahkan-sejumlah-bantuan-kepada-nelayan-aceh-di-sabang/>
20. <https://sumateranews.co.id/kunker-ke-aceh-komisi-iv-dpr-ri-serahkan-bantuan-10-milyar-kementerian-kelautan-perikanan/>
21. <https://lintasnusantara.net/2019/12/dpr-ri-komisi-iv-melakukan-kunker-ke-provinsi-aceh/>
22. <http://www.acehtimes.id/kementerian-perikanan-dan-kelautan-serahkan-bantuan-untuk-nelayan-aceh/>
23. <http://amp.oppo.baca.co.id/41531213>

LAMPIRAN DOKUMENTASI



Gambar Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Perikanan Samudera dan Pangkalan Pengawasan SDKP Lampulo Aceh.



Gambar Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Gubernur Aceh.



Gambar Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) Sabang



Gambar Kunjungan Kerja Komisi IV DPR RI ke Balai Pembibitan Ternak Unggul Dan Hijauan Pakan Ternak (BPTU-HPT) Indrapuri